

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional

(UMR) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Khifatih Sukma Utami

Nomor Mahasiswa : 15313230

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional
(UMR) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Khifatih Sukma Utami

Nomor Mahasiswa : 15313230

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penulis,



Khifatih Sukma Utami

PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017

Nama : Khifatih Sukma Utami

Nomor Mahasiswa : 15313230

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Februari 2019

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sidiq', with a large, stylized flourish underneath.

Sahabudin Sidiq ,S.E., M.A.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UMP DI JAWA TENGAH
TAHUN 2011-2018**

Disusun Oleh : **KHIFATIH SUKMA UTAMI**

Nomor Mahasiswa : **15313230**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 18 Maret 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.

Penguji : Prastowo, SE., M.Ec..Dev.



.....
.....

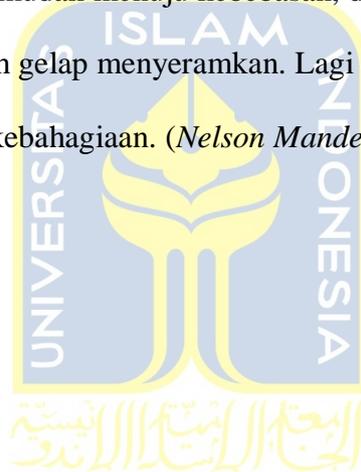
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)
- Seseorang bisa duduk di tempat teduh sekarang, karena seseorang telah menanam pohon sejak lama. (*Warren Buffett*)
- Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus melewati lembah gelap menyheramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan. (*Nelson Mandela*)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kemudahan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

- ✓ Orang tua saya tersayang Bapak Sholikhin dan Ibu Kusniati Mursidah, terimakasih atas pengorbanannya, kesabarannya dalam membimbingku, selalu memberi motivasi ketika saya lelah beraktivitas dan doa-doa baik yang selalu di panjatkan sehingga saya berada di titik ini
- ✓ Kakakku tersayang, Ilham Luhur Praja yang selalu sabar dan selalu setia ketika aku membutuhkan
- ✓ Teman-temanku Agnisa, Syaquia, Rizka, Febi yang selalu mendengarkan semua keluh kesahku, menghiburku, dan memberi solusi ketika ada masalah
- ✓ Teman-teman “Kos Ijo” (Alfi, Agnisa, Ismi, Intan, Anat, Arum) terimakasih telah menemani begadang mengerjakan penelitian ini sampai larut malam
- ✓ Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah memberi kesempatan, kelancaran, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017”.

Karya ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan karya ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Sahabudin Sidiq ,S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan sabar dalam melakukan bimbingan hingga pada tahap akhir skripsi
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini, serta Dosen, Staf Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

4. Teman-Temanku Agnisa, Syaquia, Rizka, Febi yang telah menemani, membantu, dan selalu memberikan arahan serta masukan dalam menulis skripsi ini
5. Teman-teman Ilmu Ekonomi Angkatan 2015 dan anak bimbing Bapak Sahab yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.



Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penulis,

Khifatih Sukma Utami

NIM : 15313230

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	ivi
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kajian Pustaka	11
2.2 Landasan Teori	18
2.2.1 Upah Minimum	18
2.2.2 Inflasi	21
2.2.3 Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB)	27
2.2.4 Kebutuhan Hidup Layak (KHL).....	29
2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	31
2.3 Hubungan Antar Variabel	33
2.3.1 Hubungan Inflasi dengan Upah Minimum Regional (UMR)	33
2.3.2 Hubungan PDRB dengan Upah Minimum Regional (UMR)	34

2.3.3	Hubungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Regional (UMR).....	35
2.3.4	Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan Upah Minimum Regional (UMR)	35
2.4	Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data	37
3.2	Definisi Operasional Variabel	37
3.2.1	Variabel Dependen	37
3.2.2	Variabel Independen	38
3.3	Metode Analisis	40
3.3.1	Metode Estimasi Data Panel	41
3.3.2	Pemilihan Model	42
3.3.3	Uji Statistik.....	43
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	45
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	46
4.2.1	Hasil Estimasi Data Panel.....	47
4.2.2	Pemilihan Model	48
4.2.3	Hasil Uji Statistik.....	50
4.2.4	Interpretasi Ekonomi.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....		55
5.1	Kesimpulan.....	55
5.2	Implikasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		57

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.2	Hasil Uji Common Effect.....	46
Tabel 4.3	Hasil Uji Fixed Effect Model.....	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Rendom Effect Model.....	47
Tabel 4.5	Hasil Uji Chow.....	48
Tabel 4.6	Hasil Uji Hausman.....	49
Tabel 4.7	Fixed Effect Model.....	50
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Model.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	UMP Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (Rupiah).....	2
-------------------	--	---



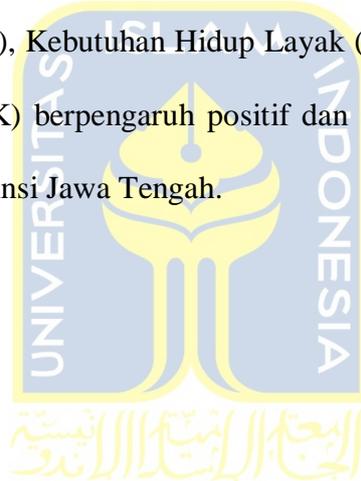
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Variabel Dependen Dan Independen.....	58
Lampiran 2	Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	65
Lampiran 3	Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	66
Lampiran 4	Hasil Uji <i>Random Fixed Effect Model</i>	67
Lampiran 5	Hasil Uji <i>Chow</i>	68
Lampiran 6	Hasil Uji <i>Hausman</i>	69



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penentuan upah minimum di 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penentuan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.



BAB I

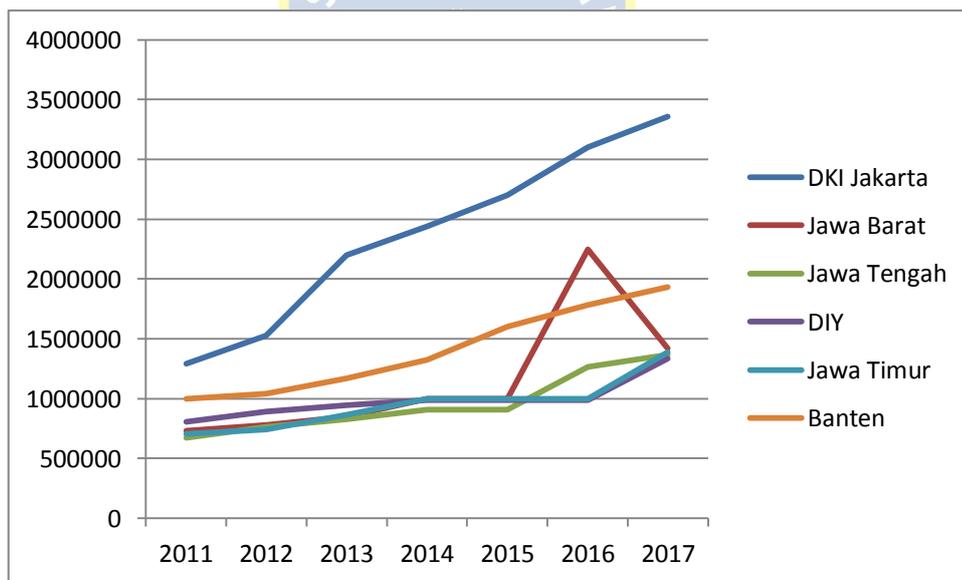
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan indikator yang memiliki keterkaitan pada hubungan industrial. Ketiganya memiliki kepentingan yang sama atas kelangsungan suatu perusahaan. Pemerintah memiliki kepentingan atas kelangsungan suatu perusahaan dalam hal pertumbuhan ekonomi pada skala nasional maupun skala daerah. Buruh mempunyai kepentingan atas kelangsungan perusahaan yang berperan sebagai sumber penghidupan dan penghasilan. Sementara pengusaha mempunyai kepentingan atas perusahaan dalam bertanggung jawab sebagai orientasi dan pimpinan dalam memperoleh keuntungan yang sesuai dengan modal yang telah di tanamkan. Pada kondisi ini, maka dapat menimbulkan kedudukan buruh menjadi subordinasi atau memiliki kedudukan di bawah dari pengusaha. Sedangkan pengusaha yang berperan sebagai pemilik modal menjadi lebih dominan sehingga membuat pihak pengusaha menjadi lebih menguntungkan.

Upah merupakan suatu imbal hasil yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada tenaga kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan. Upah merupakan salah satu indikator penting bagi kehidupan sehari-hari terutama bagi tenaga kerja yang hanya mengandalkan upahnya untuk memenuhi hidup keluarganya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Maka dari itu, setiap pekerja mengharapkan upah yang lebih besar agar dapat mencukupi kebutuhan

hidupnya secara layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Upah yang diberikan oleh perusahaan tergantung produktivitas tenaga kerja atau kebijakan upah minimum dari pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012). Setiap provinsi di Indonesia mempunyai kebijakan dalam menentukan upah minimumnya, yang biasa disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kemudian di setiap Kabupaten atau Kota di dalam suatu provinsi juga berhak menetapkan upah minimumnya sendiri, tetapi tidak boleh kurang dari UMP sehingga upah minimum suatu Kabupaten atau Kota harus lebih besar dari UMP. Berikut data Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2017:



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.1 Upah Minimum Provinsi Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (Rupiah)

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa upah minimum di Pulau Jawa berbeda-beda dan selalu mengalami kenaikan dari tahun 2011-2017. Perbedaan upah minimum di setiap provinsi tersebut karena UMP ditentukan secara regional. Pemerintah pusat tidak menentukan UMP di masing-masing provinsi, tetapi hanya

memberikan kriteria dalam penentuan UMP . Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa provinsi DKI Jakarta selalu menduduki UMP tertinggi diantara provinsi lain di Jawa, sedangkan provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling dominan dengan UMP terendah di antara provinsi lainnya pada tahun 2011-2017.

Penerapan upah minimum telah banyak menuai pro dan kontra diantara para ekonom. Upah sering memunculkan perselisihan diantara perusahaan dengan serikat pekerja karena kemauan dan kebutuhan mereka yang berbeda. Serikat pekerja menginginkan upah yang lebih tinggi atau terus meningkat, sedangkan perusahaan jika menaikkan upah maka akan mempengaruhi laba sehingga laba dari perusahaan tersebut akan berkurang. Di sisi lain, naik turunnya laba tergantung pada produktivitas kerja. Jika produktivitas meningkat, maka upah juga harus meningkat atau naik. Sebaliknya, jika ada suatu peningkatan upah maka seharusnya produktivitas juga mengalami peningkatan. Diantara upah dengan produktivitas ini memiliki hubungan yang positif, seperti konsep dari *efficiency wage theory* (Kertiasih, 2017).

Lebih lanjut, teori tersebut menjelaskan bahwa penetapan upah memungkinkan tenaga kerja untuk meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Dalam upaya meningkatkan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan tenaga kerjanya agar mempunyai kualitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap peningkatan produktivitas (Sari, 2013). Dengan demikian, maka dapat

merangsang tenaga kerja dalam menumbuhkan etos kerja dan buruh untuk bekerja lebih baik lagi.

Tujuan dari kebijakan upah minimum adalah untuk mencegah terjadinya kemerosotan upah, meningkatkan produktivitas, mencegah terjadinya penurunan daya beli pada tenaga kerja yang sebelumnya pada kondisi paling rendah, dan mengurangi perbedaan antara masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi maupun rendah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012). Dalam hal ini, masih banyak pekerja atau buruh yang belum mendapatkan haknya mengenai Upah Minimum Regional. Misalnya pekerja yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan UMR atau dibawah UMR.

Selain itu, banyak juga pekerja yang sudah bekerja lama selama bertahun-tahun tetapi upah tetap, tidak ada peningkatan. Begitu juga dengan pekerja yang sudah menikah dan tentunya memiliki kebutuhan hidup yang lebih banyak pun mendapatkan upah sama dengan UMR. Pada suatu perusahaan terdapat beberapa jabatan yang memiliki perbedaan upah sangat kecil sehingga banyak para pekerja yang unjuk rasa untuk mendapat kepastian dari hak yang seharusnya mereka dapat. Jika pekerja sudah mendapat kepastian, maka pekerja juga akan semangat, tenang, dan memiliki gairah yang tinggi dalam bekerja yang akan berdampak pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja sehingga produksi juga akan meningkat dan perusahaan akan maju dan berkembang. Dalam penelitian ini penulis memilih Jawa Tengah karena upah minimum yang sangat rendah di bandingkan beberapa provinsi di Jawa (Nurtiyas, 2016).

Dalam menentukan upah minimum, diperlukan beberapa faktor. Salah satunya adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus, baik barang dan jasa, maupun faktor produksi. Pemerintah menggunakan faktor inflasi agar dapat mengetahui kondisi harga-harga saat ini sehingga dapat menyesuaikan antara tingkat upah dan harga yang sedang terjadi (Wibowo, 2018).

Dengan terjadinya inflasi, maka dapat menyebabkan upah pekerja mempunyai kemampuan yang semakin sedikit untuk membeli barang maupun jasa yang dibutuhkan, sehingga dapat menurunkan daya beli dari upah tersebut. Pada dasarnya harga barang-barang dan upah akan selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut besarnya tidak sama besar dan tidak terjadi secara bersamaan atau serentak, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana upah akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja (Gaussian, 2016). Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian antara tingkat upah dengan kenaikan harga barang-barang agar dapat meningkatkan daya beli upah pekerja.

Selain inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga merupakan faktor dalam penentuan upah minimum. PDRB adalah jumlah tingkat output yang di produksi. PDRB ditetapkan sebagai faktor penentu upah minimum karena besarnya nilai Upah Minimum Regional (UMR) mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh para pekerja. Dalam teori upah efisiensi menjelaskan bahwa dalam penetapan upah minimum dapat memungkinkan meningkatnya nutrisi pada tenaga kerja dan keluarganya, yang berdampak pada meningkatnya produktivitas. Menurut teori tersebut, upah yang dibayarkan berada jauh diatas keseimbangan upah

sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan jumlah output yang di produksi oleh pekerja juga akan meningkat. PDRB merupakan fakto penting yang digunakan dalam penetapan upah minimum karena tingkat output yang di produksi memiliki pengaruh terhadap keuntungan atau laba yang dihasilkan. Apabila keuntungan meningkat, maka tingkat upah minimum juga harus di tingkatkan (Kertiasih, 2017).

Pertimbangan lain dalam kebijakan penetapan upah minimum yaitu dengan faktor Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL adalah suatu standar yang dibutuhkan seorang pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dalam waktu satu bulan. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjan, Pemerintah menggunakan standar KHL dalam menetapkan upah minimum. Terdapat beberapa ketentuan KHL, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 mengenai Komponen dan Pertahanan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, antara lain jumlah dalam jenis kebutuhan hidup layak yaitu berjumlah 46 jenis. Namun, terdapat beberapa perubahan atau revisi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 mengenai Perubahan Penghitungan KHL. Perubahan tersebut terdapat penyesuaian jenis kuantitas maupun kualitas KHL yang awalnya 46 jenis menjadi 60 jenis KHL.

Faktor lainnya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK berguna untuk mengetahui penawaran tenaga kerja agar dapat menyesuaikan dengan upah yang layak bagi seorang pekerja karena pada umumnya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Terjadinya penurunan tenaga kerja

disebabkan karena keterbatasan jumlah lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan tingkat penawaran tenaga kerja. Apabila terjadi kenaikan penawaran kerja, maka penawaran tenaga kerja yang berlebihan akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, sehingga akan menurunkan tingkat upah. Apabila pangsa tenaga kerja pada sektor informal lebih rendah, maka nilai upah juga akan memburuk (Kistanto, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah inflasi berpengaruh terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017?
- b. Apakah PDRB berpengaruh terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017 ?
- c. Apakah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berpengaruh terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017?
- d. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017
- b. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017
- c. Untuk menganalisis pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017

- d. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap UMR di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah literatur mengenai pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkan pada inflasi, PDRB, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Tengah pada tahun 2011-2017.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai latihan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan sesuai dengan kenyataan di lapangan
- 2) Sebagai sarana dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti
- 3) Sebagai sarana untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan bahan untuk mempertimbangkan dalam membuat kebijakan untuk perencanaan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

c. Bagi Tenaga Kerja

Sebagai sumber informasi bagi tenaga kerja mengenai UMR yang diterimanya dibanding UMR daerah lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini memuat pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, dan kekurangan maupun kelebihan dari penelitian sebelumnya. Landasan teori menjelaskan identifikasi dari semua variabel yang terlibat dalam penelitian ini dan hubungan antar variabel tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan data-data yang akan di analisis dan hasil maupun pembahasan dari analisis tersebut. Pembahasan tersebut untuk menjawab hipotesis serta tujuan dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan berisi pokok-pokok bahasan yang terdapat pada hasil pembahasan dari analisis yang telah dilakukan. Implikasi membahas mengenai saran atau tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Nama	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Febrika Nurtiyas (2016)	Variabel Dependen : Upah Minimum Propinsi (UMP) Variabel Independen: Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB, pendapatan per kapita	Regresi Data Panel	IHK tidak berpengaruh signifikan terhadap UMP. TPAK dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap UMP. Pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai UMP di Pulau Jawa.
Indah Sari (2018)	Variabel Dependen : upah minimum Variabel Independen: inflasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB	Regresi Linier Berganda	Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan upah minimum kabupaten di kota Medan. TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penentuan UMK. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK di kota Medan.
Luh Kertiasih (2017)	Variabel Dependen : Upah Minimum Regional (UMR) Variabel Independen: tingkat	Regresi dengan variabel dummy	Tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap UMR

	inflasi, tingkat pertumbuhan		di Provinsi Bali tahun 2008-2015.
Erna Agustiani (2007)	Variabel dependen : Upah Minimum Regional (UMR) Variabel independen: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, PDRB	Analisis regresi linier berganda	KHL, PDRB, dan inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UMR Lampung.
Alan Amundi Wibowo (2018)	Variabel dependen : Upah Minimum Kabupaten/Kota Variabel independen: Indeks Harga Konsumen (IHK), PDRB, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), investasi	Analisis Regresi Berganda	TPAK dan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap UMR di Provinsi DIY. IHK dan PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap UMR DIY.
Ninda Noviani Charysa (2013)	Variabel dependen: Upah Minimum Regional Jawa Tengah Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi.	Regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Jawa Tengah. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMR di Jawa Tengah.

<p>Wulandari Putri Purhadiyanto (2018)</p>	<p>Variabel dependen: Upah Minimum Regional</p> <p>Variabel independen: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p>Regresi data panel</p>	<p>KHL, PDRB, dan IPM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional. Inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Upah Minimum Regional.</p>
<p>Eka Nursakinah (2017)</p>	<p>Variabel dependen: Upah Minimum di Jabodetabek</p> <p>Variabel independen: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK), PDRB, Jumlah pencari kerja</p>	<p>Regresi data panel</p>	<p>KHL, PDRB, dan Jumlah pencari kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan upah minimum di Jabodetabek. IHK tidak berpengaruh terhadap upah minimum di Jabodetabek.</p>
<p>Ilham Kristanto (2013)</p>	<p>Variabel dependen: UMR</p> <p>Variabel independen: KHL, PDRB, Tingkat</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>KHL dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UMR. Tingkat Inflasi tidak memiliki</p>

	Inflasi		pengaruh yang signifikan terhadap UMR.
Armidi (2018)	Variabel dependen: Upah Minimum Provinsi (UMP) Variabel independen: TPAK dan IHK	Analisis regresi linier berganda	TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMP. IHK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMP dan Provinsi Jambi.

Nurtiyas (2016) Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014” dengan menggunakan variabel dependen UMP dan variabel independen Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendapatan Per Kapita. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IHK tidak memiliki pengaruh terhadap UMP, sedangkan TPAK dan PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMP. Pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah periode waktu pengamatan yang pendek yaitu hanya lima tahun, sehingga jumlah time series yang dianalisis hanya lima tahun.

Indah Sari (2018) Penelitian ini berjudul “Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Besaran UMK di Kota Medan” dengan menggunakan variabel dependen UMP dan variabel independen Inflasi, TPAK, PDRB. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap UMP. TPAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMP. PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMP.

Luh Kertiasih (2017) Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015”. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi dengan variabel *dummy*. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap UMR.

Erna Agustiani (2007) Penelitian ini berjudul “Analisis Penentuan Kebijakan Upah Minimum Di Provinsi Jawa Tengah”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan runtut waktu dari tahun 1985 sampai 2004. Metode analisis dalam penelitian ini adalah 2 SLS (Two Stage Least Square) dengan model persamaan simultan, yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi UMP. Adapun variabel independen yang mempengaruhi UMP antara lain Kebutuhan Hidup Minimum, Jumlah Penduduk, dan PDRB. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel KHM dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap UMP. Sementara variabel PDRB memiliki pengaruh yang negatif terhadap UMP.

Alan Amundi Wibowo (2018) Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan model penyesuaian *partial*. Variabel dalam penelitian ini adalah UMP, IHK, PDRB, TPAK, dan Investasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa variabel TPAK dan Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap UMR. Sementara variabel IHK dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMR.

Ninda Noviani Charysa (2013) Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan UMR. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMR, sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Wulandari Putri Purhadiyanto (2018) Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor Penentu Kebijakan UMR di Indonesia Tahun 2006-2015” dengan variabel KHL, PDRB, Tingkat Inflasi, IPM, dan UMR. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis regresi data panel. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel KHL, PDRB, dan

IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMR. Variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMR, artinya ketika terjadi peningkatan harga atau inflasi mengakibatkan nilai upah riil menurun dan dapat merugikan para pekerja.

Eka Nursakinah (2017) Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum di Jabodetabek Tahun 2007-2016” dengan variabel KHL, IHK, PDRB, Jumlah Pencari Kerja, dan Upah Minimum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel KHL, PDRB, dan Jumlah Pencari Kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Upah Minimum, sedangkan variabel IHK tidak memiliki pengaruh terhadap Upah Minimum.

Ilham Kristanto (2013) Penelitian ini berjudul “Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember” dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa variabel KHL dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum, sedangkan variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum.

Armidi (2018) Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Indeks Harga Konsumen Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi”. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TPAK tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap UMP, sedangkan IHK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap UMP.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Upah Minimum

2.2.1.1 Pengertian Upah Minimum

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, upah minimum merupakan standarr minimum untuk acuan bagi para pelaku industri maupun pengusaha dalam memberikan upah kepada tenaga kerja di wilayah atau lingkungan kerjanya. Upah minimum merupakan suatu penerimaan terendah setiap bulannya sebagai imbalan yang berbentuk uang dan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas jasa-jasa yang telah dilakukan dan atas persetujuan atau perjanjian kerja antara pekerja dengan pegusaha. Dalam menentukan upah minimum di setiap daerah mempunyai standarnya masing-masing, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah yang berbeda-beda dalam memenuhinya, maka disebut dengan Upah Minimum Regional (UMR). Berdasarkan PP N0. 8/1981 upah minimum dapat di tetapkan secara regional, sektoral regional, dan subsektoral, meskipun sampai saat ini hanya upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi tenaga kerja dalam masa kerja nol hingga satu tahun. Unsur penting dalam pengertian upah minimum tersebut adalah upah terendah tersebut harus layak diterima oleh pekerja pada masa pertama kali di terima bekerja dan upah minimum tersebut harus dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja secara layak.

Dalam mencukupi kebutuhan hidup para pekerja maka diperlukan upah minimum agar tingkat pendapatan “*living wage*” dapat tercapai. Artinya orang yang bekerja bisa menerima pendapatan yang layak bag hidupnya. Tujuan dari upah minimum adalah mencegah terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja khususnya low skilled, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan upah minimum untuk beberapa daerah kabupaten maupun setiap provinsi dalam setiap tahun sekali (Wibowo, 2018).

2.2.1.2 Komponen Upah Minimum

Komponen dalam menetapkan upah minimum antara lain: (Shamad,1992)

- a. Upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan ketentuan upah pokok kurang lebih 75% dari upah minimum
- b. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha secara tetap dan berkala yang tidak dikaitkan dengan prestasi tertentu atau kedatangan
- c. Pembayaran yang didasari oleh upah meliputi lembur, pembayaran kecelakaan kerja, dan pesangon tetap berlaku seperti ketentuan yang telah diatur, namun tidak boleh kurang dari upah minimum yang ditetapkan
- d. Pengaturan upah minimum juga berlaku untuk tenaga kerja pada masa uji coba maupun bekerja dalam masa pendidikan atau latihan, kecuali latihan khusus dengan program tertentu dan hasil prodksi dari latihan tersebut tidak dijual sama dengan produksi biasa

- e. Penentuan upah minimum di tinjau minimal satu kali dalam satu tahun agar dapat mengikuti perubahan yang terjadi seperti naik turunnya harga barang kebutuhan pekerja
- f. Perusahaan yang tidak mampu menerapkan upah minimum karena kondisi yang sedang dihadapi seperti perusahaan yang masih baru atau perusahaan yang sedang terkena bencana alam, maka perusahaan dapat memohon penangguhan kepada Menteri Tenaga Kerja.

2.2.1.3 Kebijakan Upah Minimum Regional

Permenaker No. 01/MEN/1999 menyebut istilah Upah Minimum untuk kabupaten/kota adalah Upah Minimum Regional Tingkat II. Kemudian dengan adanya Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000, istilah tersebut berubah menjadi Upah Minimum Kota (UMK). UMK ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/MEN/2000. Berikut ketentuan-ketentuan dalam penetapan UMK:

1. Upah Minimum Kota tidak boleh kurang dari upah minimum
2. Upah Minimum Kota ditinjau minimal satu kali dalam satu tahun
3. Penetapan UMK paling lambat 40 hari sebelum tanggal diberlakukan upah minimum
4. Penetapan UMK diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kota yang dihasilkan dalam pembahasan antara pemerintah, serikat pekerja, maupun APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).
5. Usulan UMK disampaikan terhadap Walikota, kemudian Walikota menerbitkan Surat Rekomendasi Walikota mengenai UMK

6. Rekomendasi Walikota adalah dasar dari Gubernur dalam penetapan UMK dan harus diterima oleh Dewan Pengupahan Provinsi selanjutnya diberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan UMK
7. Keterlambatan dalam menyerahkan rekomendasi dari Walikota, memberi kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan UMK sendiri setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
8. Dalam menetapkan upah minimum perlu adanya beberapa pertimbangan antara lain Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK), kondisi pasar, tingkat upah yang berlaku di daerah tertentu pada umumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita
9. Kemungkinan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) lebih besar dari 5% UMK (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015).

2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMR

Faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum salah satunya adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah minimum harus sesuai dengan nilai KHL yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup para pekerja dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan 2100 kkal per hari, sandang, papan, serta pendidikan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi upah minimum antara lain Inflasi, PDRB, dan TPAK seperti yang terdapat dalam penelitian ini (Nursakinah, 2015).

2.2.2 INFLASI

2.2.2.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kondisi terjadinya kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama (Sadono Sukirno, 2002). Sedangkan menurut Bank Indonesia naiknya harga satu atau dua barang maupun dalam sekali waktu tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali jika kenaikan harga tersebut menyebabkan naiknya harga barang lain (Kristanto, 2013).

Menurut Samuelson (2001:390), inflasi merupakan suatu kondisi terjadinya kenaikan tingkat harga barang maupun jasa secara umum, serta faktor-faktor produksi. Hal tersebut menunjukkan lemahnya daya beli kemudian diikuti oleh merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Definisi lain menjelaskan bahwa terjadinya inflasi ketika keadaan tidak seimbang (*disequilibrium*) antara penawaran dan permintaan agregat atau permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan tingkat harga umum antara arus barang dan arus uang. Apabila arus barang lebih besar dari arus uang dapat menimbulkan deflasi, sebaliknya jika arus uang lebih besar dari arus barang akan menyebabkan kenaikan tingkat harga sehingga terjadi inflasi.

2.2.2.2 Macam-macam inflasi

Menurut para ahli ekonomi, inflasi dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Berdasarkan Sifat Inflasi

Menurut Putong (2002:260), terdapat empat kategori utama inflasi berdasarkan sifatnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Inflasi rendah/merayap (Creeping Inflation), artinya besarnya inflasi kurang dari 10% per tahun

- b. Inflasi menengah (Gallopang Inflation), artinya besarnya inflasi antara 10%-0% per tahun yang dapat di tandai dengan naiknya harga secara tajam dan cepat. Biasanya disebut dengan dua digit
 - c. Inflasi berat (High Inflation), artinya besarnya inflasi antara 0%-100% per tahun. Kondisi ini merupakan adanya perubahan dan naiknya harga barang-barang secara umum
 - d. Inflasi sangat tinggi (Hyper Inflation), artinya kenaikan inflasi melebihi 100% yang ditandai dengan kenaikan harga secara derastis dan mencapai empat digit.
2. Berdasarkan penyebab inflasi

Terdapat tiga bentuk inflasi berdasarkan penyebabnya, antara lain:

- a. Demand Pull Inflation

Demand pull inflation merupakan naiknya harga-harga akibat gangguan di sisi permintaan barang dan jasa yang tidak seimbang sehingga dapat mendorong harga menjadi meningkat dan terjadi inflasi. Pada demand pull inflation ini meningkatkan harga output yang mendahului naiknya harga barang input maupun harga faktor produksi seperti tingkat upah.

- b. Cost Pull Inflation

Cost push inflation merupakan inflasi akibat adanya gangguan di sisi penawaran barang dan jasa yang ditandai dengan naiknya harga dan disertai turunnya output atau produksi. Maka dari itu, inflasi yang disertai dengan resesi biasanya muncul karena adanya penurunan

penawaran total (aggregate supply) yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi.

c. Demand supply inflation

Dalam hal ini, agregate demand (peningkatan permintaan total) mengakibatkan harga-harga naik kemudian diikuti oleh agregate supply (penurunan penawaran total) dan mengakibatkan harga-harga naik lebih tinggi.

3. Berdasarkan Asal-Usul Inflasi

Menurut Nopirin (1994:164), terdapat dua jenis inflasi berdasarkan asal-usulnya, antara lain:

a. Inflasi berasal dari dalam negeri (domestic inflation)

Domestic Inflation disebabkan oleh adanya gangguan dari dalam negeri yang berasal dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau tindakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perekonomian.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)

Imported inflation terjadi karena pengaruh dari naiknya harga-harga dari luar negeri, khususnya harga barang-barang impor yang naik dan akan mengakibatkan naiknya harga barang-barang input produksi yang belum bisa di produksi secara domestik.

2.2.2.3 Dampak Inflasi

Menurut Huda (2008:181), terdapat beberapa dampak bagi perekonomian secara keseluruhan yang di akibatkan oleh inflasi, antara lain:

1. Berkurangnya investasi
2. Kenaikan tingkat bunga
3. Penanaman modal bersifat spekulatif yang meingkat
4. Terjadinya kegagalan pelaksanaan pembangunan
5. Adanya ketidakpastian kondisi perekonomian di masa yang akan datang
6. Megakibatkan berkurangnya daya saing produk nasional
7. Mengakibatkan terjadinya defisit neraca pembayaran
8. Terjadi kemerosotan tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat
9. Jumlah pengangguran yang meningkat

2.2.2.4 Kebijakan Mengatasi Inflasi

Inflasi yang berlangsung secara terus-menerus dapat menyebabkan lemahnya kondisi perekonomian Indonesia. Maka dari itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Ada dua macam kebijakan diambil oleh pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adapun langkah-langkah yang diterapkan pemerintah dengan kebijakan fiskal antara lain:

1. Menaikkan pajak, yaitu dengan mengurangi agregate demand yang diakibatkan oleh cost push atau kenaikan biaya

2. Mengurangi pengeluaran pemerintah secara bertahap agar dapat meningkatkan kemandirian pada masyarakat dan masyarakat menjadi semakin efisien
3. Mengurangi ekonomi dengan biaya yang tinggi. Misalnya dengan melakukan deregulasi pada perizinan yang dapat mempermudah pendistribusian barang sehingga harga barang menjadi turun atau tetap dan dapat mencegah peekonomian agar tidak terjadi inflasi.

Sementara pada kebijakan moneter, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi inflasi sebagai berikut: (Hempri Suyatno, 2002)

1. Kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar yang akan berdampak pada turunnya tingkat inflasi
2. Menaikkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), sehingga banyak bank swasta yang ingin memilikinya. Kemudian bank umum akan menaikkan suku bunga deposito dan hasil uang yang telah dikumpulkan tersebut digunakan untuk membeli SBI. Selanjutnya bank harus mengumpulkan dana sebanyak mungkin yang diperoleh dari tabungan dengan strategi meningkatkan harga suku bunga agar nasabah tertarik untuk menabung, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian SBI.
3. Memperbaiki nilai tukar mata uang dengan cara intervensi terhadap mata uang asing, sehingga nilai tukar dapat diatur dan mempermudah biaya impor barang-barang input.

2.2.3 Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.3.1 Pengertian PDRB

PDRB adalah salah satu indikator untuk penilaian kinerja suatu perekonomian, khususnya dalam melakukan analisis mengenai hasil dari pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah atau suatu negara. Apabila produksi barang maupun jasa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, maka PDRB dikatakan mengalami pertumbuhan (Bappeda, 2013).

PDRB merupakan jumlah nilai dari seluruh barang dan jasa yang di produksi dalam jangka waktu satu tahun di suatu daerah atau wilayah tertentu yang lebih mementingkan adanya faktor produksi yang berguna untuk proses produksi tersebut tanpa adanya perbedaan kepemilikan aktor produksi. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB adalah jumlah nilai tambahan yang diperoleh dari seluruh unit usaha pada suatu daerah, atau jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

2.2.3.2 Metode PDRB

Terdapat dua metode yang digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu langsung dan tak langsung. Dalam metode langsung terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk perhitungan PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari barang maupun jasa yang telah di produksi oleh suatu kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan ongkos kirim masing-masing total produksi bruto setiap kegiatan pada sektor atau subsektor dan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Nilai

tambah artinya selisih antara nilai produksi dengan nilai ongkos kirim bahan baku yang digunakan.

2. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini merupakan nilai tambah yang diperoleh dari setiap kegiatan ekonomi dengan menjumlahkan semua jasa yang diperoleh faktor produksi, seperti gaji, upah, surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto di sektor pemerintah dengan usaha yang tidak memiliki sifat hanya mencari untung saja, dan surplus usaha tidak di perhitungkan yang meliputi sewa tanah, keuntungan, dan bunga yang dibayarkan neto.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini merupakan jumlah antara nilai penggunaan akhir dari barang maupun jasa yang di produksi di dalam negeri. Total persediaan barang dan jasa digunakan untuk konsumsi pada lembaga swasta yang bertujuan tidak hanya mencari untung, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor neto.

Sementara metode tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu:

1. PDRB atas dasar harga konstan

PDRB atas dasar harga konstan merupakan penjumlahan nilai produksi atau pengeluaran maupun pendapatan yang dihitung menurut harga tetap dengan cara menilai ulang yang didasarkan pada harga-harga pada tingkat dasar dan menggunakan indeks harga konsumen.

2. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku adalah total jumlah nilai tambah bruto yang muncul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah artinya nilai yang ditambahkan kepada barang maupun jasa yang digunakan oleh unit produksi pada saat proses produksi dan sebagai input antara nilai yang telah ditambahkan tersebut merupakan imbal jasa atas partisipasinya faktor produksi dalam proses produksi.

2.2.4 Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

2.2.4.2 Pengertian KHL

KHL adalah standar kebutuhan pekerja yang harus dipenuhi agar dapat hidup secara layak dalam waktu satu bulan. Menurut SMERU (2003), upah minimum dianggap sebagai sumber penghasilan bersih untuk mencukupi kebutuhan hidup yang meliputi kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. Selain itu, sebisa mungkin digunakan untuk menabung. Menurut UU No 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pada pasal 88 ayat (4) dijelaskan bahwa pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas (Utami, 2013).

2.2.4.3 Proses Penetapan KHL

Terdapat beberapa Pedoman mengenai Survei Harga Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi/Kota membentuk Tim Survei dengan beranggotakan dari unsur tripartit, yaitu perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta pihak yang netral dari akademisi
2. Penetapan metode survei dengan kuesioner yang ditanyakan kepada responden oleh Tim Survei. Dalam upaya menentukan nilai harga KHL yang akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi di setiap wilayah, Tim Survei Dewan Pengupahan melakukan survei harga.
3. Dalam melakukan survei harga, harus sesuai dengan kriteria dalam pemilihan tempat yang dilakukan di pasar tradisional. Adapun kriteria pasar tersebut antara lain:
 - a. Bangunan fisik pasar yang relatif besar
 - b. Berada di daerah perkotaan
 - c. Terdapat berbagai macam komoditas yang dijual
 - d. Terdapat banyak pembeli
 - e. Waktu keramaian dalam berbelanja relatif panjang
4. Waktu pelaksanaan survei dilakukan setiap bulan pada minggu pertama
5. Pemilihan responden yaitu pedagang yang menjual barang kebutuhan secara eceran
6. Menggunakan metode survei harga untuk memperoleh data harga barang maupun jasa dengan cara menanyakan harga barang secara langsung seolah-olah petugas survei akan membeli barang tersebut agar diperoleh harga yang sesungguhnya

7. Pengolahan data

8. Pelaporan

Berdasarkan Himpunan Peraturan Bidang Pengupahan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2008, terdapat beberapa tahapan dalam mengolah data harga KHL, sebagai berikut: (Kristanto, 2013)

1. Menghitung harga rata-rata dari tiga responden. Harga rata-rata yaitu pembagian antara jumlah harga dari tiga responden kemudian dibagi tiga yang dilakukan untuk setiap jenis kebutuhan
2. Melakukan konversi (penyesuaian satuan) pada jenis barang kebutuhan yang dijual dalam satuan yang berbeda-beda dari satuan komponen KHL
3. Menghitung harga rata-rata antara kebutuhan wanita dan kebutuhan pria dengan menjumlahkan harga di antara keduanya kemudian dibagi dua
4. Menghitung variasi harga barang untuk memperoleh satu harga pada setiap jenis kebutuhan, sehingga dihitung harga rata-rata dari berbagai macam jenis kebutuhan tersebut
5. Memindahkan data yang telah diolah ke dalam form isian KHL
6. Menghitung jumlah nilai di setiap komponen KHL
7. Melakukan perhitungan nilai KHL
8. Menhitung rata-rata nilai KHL yang diperoleh dari tiga lokasi pasar

2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.2.5.1 Pengertian TPAK

Angkatan kerja (labor force) adalah jumlah orang yang bekerja maupun yang menganggur, sementara tingkat pengangguran (unemployment rate) adalah persentase dari angkatan kerja yang sedang tidak bekerja (Gregory Mankiw, 2013).

Angkatan kerja merupakan jumlah pekerja yang terdapat dalam perekonomian di waktu tertentu (Sukirno, 2004:18). Terdapat beberapa golongan di dalam suatu angkatan kerja, yaitu golongan bekerja dan golongan menganggur yang sedang mencari suatu pekerjaan. Sementara arti bukan angkatan kerja adalah orang yang masih menempuh pendidikan atau sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain.

Sementara definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu perbandingan atau rasio antara jumlah tenaga kerja dan penduduk yang dalam usia kerja. Adapun pengertian penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun yang memiliki potensi dalam memproduksi suatu barang maupun jasa. TPAK merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan tingkat tenaga kerja di Indonesia. Tujuan dari perhitungan TPAK adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai persentase angkatan kerja terhadap penduduk dalam usia kerja. Dalam hal ini, besar kecilnya kesempatan kerja dapat diukur dengan nilai TPAK. Apabila nilai TPAK tinggi maka menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia besar, sebaliknya apabila nilai TPAK rendah maka kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk dalam usia kerja kecil.

2.2.5.2 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut pandangan klasik, upah dapat menyesuaikan diri dalam menormalkan penawaran yang berlebihan pada pasar tenaga kerja akibat dari penurunan permintaan tenaga kerja yang terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada turunya upah tenaga kerja. Terdapat dua golongan yang terdapat pada pasar tenaga kerja, yaitu pasar tenaga kerja terdidik maupun pasar tenaga kerja tidak terdidik. Dua golongan pasar tenaga kerja tersebut memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada pasar tenaga kerja terdidik pada umumnya memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi dan tercermin pada tingkat upah dan penghasilan yang diterima oleh pekerja yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang telah di tempuhnya.

Selain itu, perbedaan lain adalah dari segi waktu, penawaran pada tenaga kerja terdidik harus melalui tahapan pendidikan serta pelatihan. Maka dari itu, biasanya penawaran tenaga kerja yang tidak terdidik memiliki elastisitas yang lebih kecil dibandingkan dengan elastisitas penawaran tenaga kerja yang tidak terdidik. Perbedaan terakhir adalah proses dalam pengisian lowongan, dalam hal ini pengusaha perlu waktu yang lebih banyak dalam menyeleksi tenaga kerja yang terdidik daripada tenaga kerja yang tidak terdidik (Kistanto, 2013).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Inflasi dengan Upah Minimum Regional (UMR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01 tahun 1999 mengenai Upah Minimum menjelaskan bahwa terdapat pertimbangan dalam perubahan tingkat upah minimum pemerintah, yaitu dilihat dari faktor inflasi atau

Indeks Harga Konsumen (IHK). Maka dari itu, inflasi mempunyai hubungan dengan meningkatnya upah. Ketika tingkat pengangguran rendah atau kesempatan kerja tinggi, para pengusaha lebih memilih untuk meningkatkan upah dalam merekrut pekerja yang berkualitas, sehingga harga output harus di tingkatkan. Harga output yang meningkat, maka laju inflasi juga meningkat. Tingginya laju inflasi menyebabkan nilai riil upah merosot dan merugikan bagi masyarakat yang menerima upah (Simanjuntak, 1996).

2.3.2 Hubungan PDRB dengan Upah Minimum Regional (UMR)

PDRB adalah suatu nilai dari semua jumlah barang dan jasa yang telah di produksi dalam kurun waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu dengan tidak membeda-bedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih membutuhkan adanya faktor produksi yang digunakan pada proses produksi tersebut. PDRB yang meningkat dapat berpengaruh pada naiknya pendapatan suatu wilayah di sektor pajak dan retribusi. Dalam penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan 2013-2017. Jika produktivitas tenaga kerja yang diukur berdasarkan output PDRB meningkat, maka seharusnya upah minimum juga perlu dinaikkan atau di tingkatkan.

PDRB merupakan salah satu faktor dalam menetapkan upah minimum menurut pemerintah dan Dewan Pengupahan. Ketika output PDRB naik, yang disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang meningkat, maka akan berpengaruh pada naiknya upah minimum. Output PDRB yang meningkat adalah suatu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah karena pendapatan suatu wilayah juga akan naik pada sektor pajak dan retribusi.

2.3.3 Hubungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Regional (UMR)

Di setiap provinsi di Indonesia memiliki kebijakan dalam menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Tingkat upah minimum tersebut didasarkan pada standar biaya yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari atau disebut Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tingkat harga berdasarkan jumlah KHL akan selalu mengalami kenaikan sehingga upah juga akan meningkat. Dengan meningkatnya harga barang setiap tahunnya, maka upah juga harus meningkat karena jika upah yang diterima oleh pekerja tetap dan tidak mengalami kenaikan maka pekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.3.4 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan Upah Minimum Regional (UMR)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi terbentuknya keseimbangan pasar tenaga kerja yang terkait dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja (Indonesia, 2018). Ketika besarnya upah ditentukan oleh mekanisme pasar yang dilihat dari permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka ketika penawaran jumlah tenaga kerja lebih besar dari permintaan, dapat menyebabkan tingkat upah berubah menjadi lebih rendah. Ketika tingkat upah rendah, maka pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan untuk menetapkan upah minimum yang berguna melindungi para pekerja (Sari, 2013).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat dikembangkan pada penelitian ini berdasarkan landasan teori, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maupun penjelasan-penjelasan diatas, antara lain:

H1 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

H2 : PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

H3 : KHL berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

H4 : TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Pada penelitian ini, data diperoleh dari data publikasi Jawa Tengah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode data yang digunakan tahun 2013-2017. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah data penelitian yang diperoleh dalam bentuk angka kemudian diolah menggunakan alat analisis statistik yaitu EViews untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh inflasi, pertumbuhan PDRB, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Tengah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011: 38). Ada 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2013-2017. UMR adalah upah bulanan terendah yang di dalamnya termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. Data UMR di dapat dari BPS Jawa Tengah.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab timbulnya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.2.2.1 Inflasi

Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Adapun rumus untuk menghitung inflasi sebagai berikut (Badan Pusat Statistik):

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-5}} \times 100$$

3.2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB dibagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh harga. Adapun cara menghitung PDRB konstan sebagai berikut (Badan Pusat Statistik):

a. Pendekatan produksi

$$Y = f(K, L, t)$$

Di mana:

Y = Produksi

K = modal

L = tenaga kerja

t = teknologi

b. Pendekatan Pendapatan

$$NI = Y_w + Y_i + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Di mana:

NI :Pendapatan nasional.

Y_w : Pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya.

Y_i :Pendapatan dari bunga.

Y_{nr} :Pendapatan dari keuntungan perusahaan Y.

Y_{nd} :pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

c. Pendekatan Pengeluaran

$$Y \text{ atau PDRB} = C + I + G + NX$$

Di mana:

Y atau PDRB: Produk Domestik Regional Bruto



C : Konsumsi

I : Investasi

G : Pengeluaran pemerintah

NX: Ekspor neto (Ekspor dikurangi Impor)

3.2.2.3 Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. KHL merupakan dasar dalam penetapan Upah Minimum.

3.2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator mengenai ketenagakerjaan yang menggambarkan penduduk aktif secara ekonomi dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan dalam periode waktu survei (Armidi., Erfit., dan Yulmardi., 2018). TPAK merupakan indikator yang berguna untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. adapun rumus untuk menghitung TPAK sebagai berikut (Badan Pusat Statistik):

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 8. Data panel adalah gabungan antara time series dengan cross section. Data time series adalah data observasi yang terdiri dari beberapa subyek yang dilakukan pada satu waktu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Data cross section adalah data observasi yang terdiri dari satu subyek penelitian dalam beberapa waktu atau satu periode waktu, misalnya lima tahun. Sedangkan data

panel adalah data observasi yang terdiri dari beberapa subyek penelitian dan diukur dari waktu ke waktu atau dalam satu periode waktu, misalnya dalam penelitian ini tahun 2011-2017. Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{UMR}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{INFLASI}_{it} + \beta_2 \text{PDRB}_{it} + \beta_3 \text{KHL}_{it} + \beta_4 \text{TPAK}_{it} + \dots + \beta_n \text{X}_{nit} + e_{it}$$

Keterangan:

UMR	: Upah Minimum Regional
INFLASI	: tingkat inflasi
PDRB	: pertumbuhan PDRB
KHL	: Kebutuhan Hidup Layak
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
α	: konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: parameter
i	: indikator daerah
t	: indikator waktu
e	: error term

3.3.1 Metode Estimasi Data Panel

a. Common Effect Model

Common Effect Model ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam data panel yang menggabungkan antara data time series dengan cross section dan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Model ini tidak dapat membedakan varians antara

silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap, dan bukan bervariasi secara random (Kuncoro, 2012).

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + e_{it}$$

b. Fixed Effect Model

Fixed Effect Model ini menggunakan intercept yang berbeda-beda pada setiap subyeknya, tetapi setiap subyek memiliki slope yang tetap atau tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Jadi dapat diasumsikan bahwa intercept pada model ini berbeda-beda pada setiap subyek, sedangkan slope nya tetap. Dalam model ini menggunakan variabel dummy untuk membedakan subyek satu dengan lainnya yang biasa disebut dengan Least Square Dummy Variables (LSDV) (Kuncoro, 2012).

$$\ln Y_{it} = \alpha_{0i} + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + e_{it}$$

c. Random Effect Model

Random Effect Model ini mengestimasi data panel dengan variabel residual yang memiliki korelasi antar subyek dan antar waktu yang diteliti. Model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy (Widarjono, 2009).

$$\alpha_{0i} = \alpha_0 + \mu_i$$

3.3.2 Pemilihan Model

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk melihat model yang mana yang sebaiknya digunakan, apakah fixed effect model atau common effect model. Fixed effect model digunakan apabila menolak H_0 dan chi-square lebih kecil dari signifikansi sebesar 5% (0,05), sedangkan common effect model digunakan apabila menerima H_0 dan chi-square lebih besar dari signifikansi yaitu sebesar 5% (0,05).

$$F = \frac{SSR_R - SSR_{U/q}}{SSR_u / (n - k)}$$

b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk melihat model mana yang sebaiknya digunakan, apakah fixed effect model atau random effect model. Fixed effect model digunakan apabila menolak H_0 dan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi sebesar 5%. Sedangkan random effect model digunakan apabila menerima H_0 dan nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi 5% (0,05).

3.3.3 Uji Statistik

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk melihat kemampuan model untuk menjelaskan varians variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol sampai satu. Kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen sangat terbatas apabila nilai R^2 nya kecil. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk mempredksi variabel dependen dapat diberikan (Kuncoro, 23:220).

b. Uji t

Digunakan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara individual dalam menjelaskan variabel independen (Kuncoro, 2003:218). Dalam pengujian ini keputusan yang diambil berdasarkan nilai probabilitas yaitu apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat, sebaliknya apabila probabilitas lebih besar dari signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Uji F-statistic

Digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang di uji dalam model terdapat pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2003:219). Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H1 : Minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Apabila probabilitas F-statistic $< \alpha$ maka H_0 ditolak, artinya variabel dependen dipengaruhi oleh semua variabel independen. Sedangkan jika probabilitas F-statistic $> \alpha$ maka gagal menolak H_0 atau menerima H_0 , artinya variabel dependen tidak dipengaruhi oleh semua variabel independen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Skripsi ini meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Regional di Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel yang merupakan gabungan antara data cross section dan data time series tahun 2011-2017. Data variabel yang digunakan adalah Upah Minimum Regional, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Inflasi, PDRB, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

	UMR	Inflasi	PDRB	KHL	TPAK
Mean	1115151	4.131347	21970504	1141432	69.74400
Median	1060000	3.420000	16107795	1054118	69.85000
Maximum	2125000	10.46000	1220008	8024100	79.35000
Minimum	717000.0	0.000000	4255662	766022.0	60.17000
Std. Dev	293140.2	2.703453	20713745	511106.7	3.816478
Observations	245	245	245	245	245

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

Hasil uji dari statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.115.151,00, UMR tertinggi pada tahun 2017 di kabupaten Semarang

yaitu sebesar Rp 2.125.000,00, sedangkan UMR terendah pada tahun 2011 di kabupaten Brebes yaitu sebesar Rp 717.000,00. Sementara rata-rata Inflasi pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,13%, Inflasi tertinggi di kabupaten Kebumen pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,46%, sedangkan Inflasi terendah sebesar 0% di kabupaten Magelang pada tahun 2012.

Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 21.970.504,00, PDRB tertinggi sebesar Rp 1.220.008,00 berada di kabupaten Semarang pada tahun 2017, sedangkan PDRB terendah berada di kabupaten Magelang tahun 2011 yaitu sebesar Rp 4.255.662,00. Rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.141.432,00, KHL tertinggi sebesar Rp 8.024.100,00, sedangkan KHL terendah sebesar Rp 766.022,00. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,74%, TPAK tertinggi sebesar 69,85%, sedangkan TPAK terendah sebesar 60,17%.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam estimasi data panel, terdapat tiga jenis teknik yang bisa digunakan antara lain model *common effect*, model *fixed effect*, dan model *random effect*. Untuk mengetahui dan menentukan model mana yang paling baik dalam mengestimasi data panel, maka dapat melakukan pengujian seperti uji F yang digunakan untuk menentukan atau memilih antara model *common effects* atau model *fixed effects*, sedangkan uji *Hausman* berguna untuk memilih antara model *random effects* atau model *fixed effects*.

4.2.1 Hasil Estimasi Data Panel

4.2.1.1 Common Effect Model

Hasil uji regresi data panel menggunakan metode *Common Effects model* sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Uji Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.450147	0.648877	3.775983	0.0002
INFLASI	0.001596	0.003594	0.443992	0.6574
LOGPDRB	0.046931	0.015305	3.066384	0.0024
LOGKHL	0.771791	0.039479	19.54961	0.0000
TPAK	-0.001133	0.002650	-0.427537	0.6694

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

Hasil dari uji regresi data panel tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) dari hasil estimasi sebesar 0.657850, menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan 65,7850% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya 34,215% dijelaskan diluar model.

4.2.1.2 Fixed Effect Model

Tabel 4.3

Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.52442	0.886682	-24.27525	0.0000
INFLASI	-0.004700	0.001571	-2.992406	0.0031
LOGPDRB	2.021399	0.063762	31.70203	0.0000
LOGKHL	0.122284	0.027329	4.474455	0.0000
TPAK	0.000977	0.002222	0.439638	0.6607

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) dari hasil estimasi sebesar 0.946557, menunjukkan bahwa variabel-variabel independent mampu menjelaskan 94,65% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 5,35% dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.2.1.3 *Random Effect Model*

Hasil pengolahan regresi data panel menggunakan metode *Random Effect Model* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.245749	0.345336	6.503093	0.0000
INFLASI	0.001506	0.001550	0.971616	0.3322
LOGPDRB	0.098322	0.012238	8.034468	0.0000
LOGKHL	0.744589	0.018162	40.99753	0.0000
TPAK	-0.005046	0.001650	-3.058610	0.0025

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

Hasil dari pengolahan regresi data panel menggunakan metode *Random Effect Model* dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) dari hasil estimasi sebesar 0.668363, menunjukkan bahwa variabel-variabel independent mampu menjelaskan 66,83% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya 33,17% dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.2.2 **Pemilihan Model**

4.2.2.1 **Uji Chow**

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah model *Common Effects* lebih baik dari model *Fixed Effects*. Uji *Chow* memiliki ketentuan hipotesis, antara lain:

$H_0 = \text{Common Effects}$

$H_a = \text{Fixed Effects}$

Jika nilai F statistik atau *chi-square* mempunyai nilai probabilitas $\leq \alpha 0,05$, maka menolak H_0 dan menerima H_a

Jika nilai probabilitas $\geq \alpha 0,05$, maka menerima H_0 dan menolak H_a

Untuk mendapatkan nilai F statistik dan nilai *chi-square*, maka dapat menggunakan uji *Redundant Fixed Effects*.

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32.730472	(34,206)	0.0000
Cross-section Chi-square	454.874024	34	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas uji F atau *Chi-square* signifikan dengan $p\text{-value } 0,0000 \leq \alpha 0,05$ (5%), artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Dari hasil olah data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Fixed Effects model* lebih baik dari *Common Effects Model*, sehingga metode estimasi yang sesuai untuk menganalisis adalah *Fixed Effects Model*.

4.2.2.2 Uji Hausman

Pada estimasi data panel, uji *Hausman* berguna untuk memilih antara model *Random Effects* dengan model *Fixed Effects*. Uji *Hausman* memiliki ketentuan hipotesis, antara lain:

$H_0 = \text{Random Effects}$

$H_a = \text{Fixed Effects}$

Jika nilai statistik *Hausman* mempunyai nilai probabilitas $\leq \alpha$, maka menolak H_0 dan menerima H_a

Jika nilai probabilitas $\geq \alpha$, 0,05 maka menerima H_0 dan menolak H_a

Tabel 4.6
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	964.595024	4	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *chi-square* sebesar $0,0000 < \alpha$ 0,05, artinya menolak H_0 dan menerima H_a , sehingga model yang tepat digunakan adalah *fixed effects*.

4.2.3 Hasil Uji Statistik

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan yaitu antara uji *Chow* dan uji *Hausman*, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan terbaik adalah *fixed effect model*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.52442	0.886682	-24.27525	0.0000
INFLASI	-0.004700	0.001571	-2.992406	0.0031
LOGPDRB	2.021399	0.063762	31.70203	0.0000
LOGKHL	0.122284	0.027329	4.474455	0.0000
TPAK	0.000977	0.002222	0.439638	0.6607

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.946557 Mean dependent var 13.89134

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah suatu acuan mengenai baik atau tidaknya model regresi yang di estimasi. Angka pada koefisien determinasi bisa digunakan untuk mengukur seberapa dekat garis regresi yang telah di estimasi dengan data yang sebenarnya. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan menggunakan *Fixed Effects Model* yaitu nilai R^2 sebesar 0.946557 artinya sebanyak 94,65% perubahan pada Upah Minimum Regional di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen pada model, dan sisanya 5,34% dijelaskan oleh variabel model yang lain.

4.2.3.2 Uji F

Uji F statistik digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh atau tidak secara bersama-sama pada variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari regresi tersebut menunjukkan probabilitas F sebesar $0,000000 \leq 0,05$ artinya

variabel Inflasi, PDRB, KHL, TPAK secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.3.3 Uji T

Tabel 4.8

Hasil Estimasi Model

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Probabilitas	Keterangan
C	-21,52442	-24,27525	0,0000	Signifikan
Inflasi	-0,004700	-2,992406	0,0031	Signifikan
LogPDRB	2,021399	0,063762	0,0000	Signifikan
LogKHL	0,122284	4,47455	0,0000	Signifikan
TPAK	0,00977	0,439638	0,6607	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

Hasil dari analisis uji t pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel inflasi, PDRB, KHL berpengaruh signifikan terhadap UMR, sedangkan variabel TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel UMR.

Dari tabel 4.8 diperoleh kesimpulan bahwa variabel Inflasi memiliki t-statistik sebesar -2,992406 dan nilai probabilitas sebesar $0,0031 < \alpha 0,05$ (5%) artinya variabel inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien regresi sebesar -0,004700 artinya inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap UMR. Maka dapat disimpulkan jika terjadi peningkatan inflasi 1% akan mengakibatkan menurunnya nilai upah minimum regional sebesar 0,004%.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki t-statistik sebesar 0,063762 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha 0,05$ (5%) artinya variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien regresi sebesar 2,021399 artinya PDRB memiliki pengaruh positif terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Maka

dapat disimpulkan jika terjadi peningkatan PDRB 1% akan mengakibatkan meningkatnya nilai upah minimum regional sebesar 2,02%.

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel KHL memiliki t-statistik sebesar 4,47455 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha 0,05$ (5%) artinya variabel KHL memiliki pengaruh signifikan terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien regresi sebesar 0,122284 artinya KHL memiliki pengaruh positif terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Maka dapat disimpulkan jika terjadi peningkatan KHL 1% akan mengakibatkan nilai upah minimum regional naik sebesar 0,12%.

Hasil dari analisis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel TPAK memiliki t-statistik sebesar 0,439638 dan nilai probabilitas sebesar $0,6607 > \alpha 0,05$ (5%) artinya variabel TPAK memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien regresi sebesar 0,00977 artinya TPAK memiliki pengaruh positif terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Maka dapat disimpulkan jika terjadi peningkatan TPAK 1% akan mengakibatkan nilai upah minimum regional naik sebesar 0,0097%.

4.2.4 Interpretasi Ekonomi

4.2.4.1 Pengaruh Inflasi terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Tengah tahun 2011-2017. Hal tersebut karena kenaikan pada perusahaan dikalkulasikan sebagai naiknya biaya produksi. Kemudian, untuk menutup biaya produksi tersebut, perusahaan mengambil solusi dengan cara menaikkan harga

output. Hal tersebut menyebabkan harga-harga barang di pasar menjadi naik. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ninda (2013) bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional.

4.2.4.2 Pengaruh PDRB terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai UMR di Povinsi Jawa Tengah karena jika PDRB meningkat, maka suatu daerah tersebut juga akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai UMR. Ketika PDRB mengalami peningkatan, UMR juga akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kistanto (2013) dan Sari (2018) bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional (UMR). Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Gaol (2006) yang menyatakan bahwa upah minimum layak di tingkatkan jika produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan yang dilihat dari besarnya output PDRB.

4.2.4.3 Pengaruh KHL terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa variabel KHL berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purhadiyanto (2018) bahwa KHL memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UMR. Hal tersebut karena Kebutuhan Hidup Layak merupakan tingkat

kebutuhan pekerja minimum yang harus dipenuhi. Apabila jumlah kebutuhan pekerja naik, maka upah minimum layak di naikkan agar para pekerja dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Hasil penelitian ini juga didukung dengan adanya UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan dari standar KHL, begitupun Pasal 88 ayat 4 yang menyatakan jika KHL mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan kenaikan upah minimum.

4.2.4.4 Pengaruh TPAK terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu persentase yang berguna untuk menghitung partisipasi angkatan kerja. Sedangkan nilai koefisien regresi TPAK sebesar 0,00977 yang berarti TPAK memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai UMR di Provinsi Jawa Tengah. Artinya jika terjadi peningkatan TPAK 1% dapat mengakibatkan meningkatnya nilai upah minimum regional di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,00977% pada tahun 2011-2017. Dalam hal ini, tingkat upah yang telah ditetapkan dapat dipengaruhi oleh meningkatnya penawaran tenaga kerja karena upah selalu dapat menyesuaikan diri dengan penawaran di pasar tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Nurtyas (2016) yang menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai UMR.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional.
3. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional.

5.2 IMPLIKASI

Terdapat beberapa implikasi yang diperoleh dari hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi UMR di provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017, antara lain:

1. Upah Minimum Regional dipengaruhi oleh beberapa variabel yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yaitu PDRB, KHL, dan TPAK. Sedangkan variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan karena terjadinya Inflasi mengakibatkan harga bahan baku naik sehingga perusahaan akan menurunkan upah pekerja agar tidak mengalami kerugian.

2. Dalam upaya menetapkan UMR agar terus meningkat, maka pemerintah sebaiknya mengambil langkah untuk membuat kebijakan dengan memberikan subsidi terhadap perusahaan untuk menekan biaya produksi agar tetap stabil atau menurun. Hal tersebut dapat mengendalikan inflasi dan upah riil dapat sebanding dengan upah yang diterima.
3. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan subsidi pendidikan agar tercipta tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Armidi, Erfit, dan Yulmardi. 2018. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Indeks Harga Konsumen Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi" dalam *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Volume 7(1)*, 33–42. Jambi: ISSN: 2303-1220 (online)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. Inflasi. <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html> diakses pada Desember 2018
- Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto. <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html> diakses pada Desember 2018
- Badan Pusat Statistik. 2016. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=51> diakses pada Desember 2018
- Charysa, Ninda Noviani. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011" dalam *Jurnal Economics Development Analysis Journal*. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2012. "Upah Minimum Regional", 2(4), 277–285, <http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id>, diakses pada Desember 2018
- Gaol, S. Lumban, 2006. "Aplikasi Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Upah Minimum", *Makalah dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan*. Bogor: Wisma Karya Jasa.
- Huda, Nurul dkk. 2008:181. "Ekonomi MakroIslam: Pendekatan Teoritis". Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hempri Suyatno. 2002. "Kebijakan Upah Minimum Yang Akomodatif" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. V No.3 : 295-313*
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/MEN/2000.

- Kertiasih, L. 2017. "Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015" dalam *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Volume 9*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia.
- Kistanto, I. 2013. "Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember". Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Ekonomika Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mankiw, Gregory. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nopirin. 1994:164. "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro". Yogyakarta: BPFE.
- Nurtiyas, Febrika. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Nursakinah, Eka. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum di Jabodetabek Tahun 2007-2016*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005
- Putong. 2002:260. "Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro". Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purhadiyanto, Wulandari Putri. 2018. "Analisis Faktor Penentu Kebijakan UMR di Indonesia Tahun 2006-2015". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Samuelson, Paul A. 2001:390. "Mikro Ekonomi". Jakarta: Erlangga
- Shamad, Yunus. 1992. *Pengupahan Pedoman Bagi Pengelola Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bina Sumber Daya Manusia.
- Sugito., Dwi Ispriyanti., Rahmah Merdekawaty. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (Sar)" dalam *Jurnal*

- Gaussian Volume 5*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Suyatno, H. 2002. "Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif" dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Volume 5(3)*, 295–313. Yogyakarta: ISSN 1410-4946
- Sugiyono. 2011. "Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payaman, J. 1996. *Masalah Upah dan Jaminan Sosial dalam Undang-Undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional
- Sari, R. 2013. "Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia (The Minimum Wage Policy in Indonesia)" dalam *Jurnal Repositori Institusi USU*, 1–15. Medan: Departemen Ekonomi Pembangunan.
- Tarigan, Robinson. 2008:44 . *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Terjemahan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 88 ayat 4
- Utami, Ratri Heningtyas. 2013. "Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional (UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur (Kendal Demak Ungaran Semarang Grobogan Salatiga)". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Semarang.
- Wibowo, A. A. 2018. Studi, P. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016". Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.



LAMPIRAN I

DATA VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN

Kabupaten	Tahun	UMR	Inflasi	PDRB	KHL	TPAK
Kab.Cilacap	2011	718666	5.27	78156818	819776	63.68
Kab.Cilacap	2012	773000	0.31	79702237	859123	65.26
Kab.Cilacap	2013	986000	8.37	81022670	1054118	66.31
Kab.Cilacap	2014	1125000	8.19	83391500	1125033	63.24
Kab.Cilacap	2015	1287000	2.63	88357607	1286584	62.39
Kab.Cilacap	2016	1608000	2.77	92830362	1542474	62.80
Kab.Cilacap	2017	1693689	4.41	95103847	1611197	66.22
Kab.Banyumas	2011	750000	3.4	24538595	792327	65.09
Kab.Banyumas	2012	795000	0.22	25982158	834551	65.35
Kab.Banyumas	2013	877500	8.5	27793138	906068	63.95
Kab.Banyumas	2014	1000000	7.09	29367687	1014188	64.27
Kab.Banyumas	2015	1100000	2.52	31164876	1099949	60.17
Kab.Banyumas	2016	1350000	2.42	33051047	1336821	60.49
Kab.Banyumas	2017	1461400	3.91	35147313	1359996	65.19
Kab.Purbalingga	2011	765000	4.47	11474221	828353	72.91
Kab.Purbalingga	2012	818500	4.09	12138445	865174	76.42
Kab.Purbalingga	2013	896500	9.57	12778311	942635	73.53
Kab.Purbalingga	2014	1023000	9.08	13397713	1022822	70.95
Kab.Purbalingga	2015	1101600	1.62	14130612	1076915	68.05
Kab.Purbalingga	2016	1377500	2.39	14806550	1409495	67.82
Kab.Purbalingga	2017	1522500	3.72	15564284	1386344	71.68
Kab.Banjarnegara	2011	730000	0.22	9952403	822674	75.09
Kab.Banjarnegara	2012	765000	4.55	10473363	864856	79.35
Kab.Banjarnegara	2013	835000	8.35	11043083	913920	73.44
Kab.Banjarnegara	2014	920000	7.78	11629846	983536	75.2
Kab.Banjarnegara	2015	1112500	2.97	12266046	1134721	72.61
Kab.Banjarnegara	2016	1265000	2.87	12929657	1255027	72.41
Kab.Banjarnegara	2017	1370000	3.67	13630385	1299887	70.95
Kab.Kebumen	2011	727500	4.52	13068985	797418	72.45
Kab.Kebumen	2012	770000	0.22	13707057	815312	75.33
Kab.Kebumen	2013	835000	10.46	14333333	870840	71.48
Kab.Kebumen	2014	975000	7.36	15163092	963712	74.57
Kab.Kebumen	2015	1157500	2.91	16115554	1157104	70.43
Kab.Kebumen	2016	1324600	2.71	16916220	1324566	71.41
Kab.Kebumen	2017	1433900	3.25	17743915	1363557	66.84
Kab.Purworejo	2011	755000	2.52	8993814	806698	66.53

Kab.Purworejo	2012	809000	0.17	9406242	851315	68.24
Kab.Purworejo	2013	849000	7.14	9870970	875577	70.87
Kab.Purworejo	2014	910000	8.48	10312938	909931	68.44
Kab.Purworejo	2015	1165000	3.45	10862646	1164192	68.86
Kab.Purworejo	2016	1300000	2.66	11418355	1334508	70.05
Kab.Purworejo	2017	1445000	4.29	12005095	1351574	64.48
Kab.Wonosobo	2011	775000	0.13	9489550	861239	74.68
Kab.Wonosobo	2012	825000	0.18	9935905	868026	76
Kab.Wonosobo	2013	880000	8.82	10333757	902604	69.31
Kab.Wonosobo	2014	990000	8.44	10828169	990000	73.9
Kab.Wonosobo	2015	1166000	2.71	11334080	1165683	74.75
Kab.Wonosobo	2016	1326000	2.97	11915999	1346080	73.14
Kab.Wonosobo	2017	1457100	3.21	12292805	1362729	72.37
Kab.Magelang	2011	802500	0.13	15323039	853564	72.33
Kab.Magelang	2012	870000	2.59	16071142	896345	74.54
Kab.Magelang	2013	942000	8.34	17020756	942000	70.23
Kab.Magelang	2014	1152000	7.91	17936288	1152049	71.76
Kab.Magelang	2015	1255000	3.6	18864652	1254848	69.63
Kab.Magelang	2016	1410000	2.86	19876744	1489250	69.24
Kab.Magelang	2017	1570000	3.47	20882801	1544408	74.49
Kab.Boyolali	2011	800500	3.35	14592026	800500	73.16
Kab.Boyolali	2012	836000	3.45	15369974	836000	74.84
Kab.Boyolali	2013	895000	8.21	16266499	895000	75.85
Kab.Boyolali	2014	1116000	7.45	17148351	1221107	74.82
Kab.Boyolali	2015	1197800	2.58	18170384	1177700	74.68
Kab.Boyolali	2016	1403500	2.65	19132556	1403410	75.58
Kab.Boyolali	2017	1519289	3.08	20188700	1492195	69.96
Kab.Klaten	2011	766022	0.09	18071350	766022	71.28
Kab.Klaten	2012	812000	0.17	19102402	812000	72.19
Kab.Klaten	2013	871500	7.92	20241429	862623	72.68
Kab.Klaten	2014	1026600	7.76	21424522	1015259	70.46
Kab.Klaten	2015	1170000	2.57	22558976	1169976	67.79
Kab.Klaten	2016	1400000	2.31	23717931	1411989	68.27
Kab.Klaten	2017	1528500	3.12	24920303	1451951	66.93
Kab.Sukoharjo	2011	790500	0.13	17319638	790358	69.03
Kab.Sukoharjo	2012	843000	4.22	18342247	841771	68.34
Kab.Sukoharjo	2013	902000	8.42	19401889	899670	67.89
Kab.Sukoharjo	2014	1150000	7.93	20449010	1167557	69.38
Kab.Sukoharjo	2015	1223000	2.69	21612078	1175689	67.17
Kab.Sukoharjo	2016	1396000	2.34	22845983	1396958	67.56
Kab.Sukoharjo	2017	1513000	3.4	24152939	1475598	67.29

Kab.Wonogiri	2011	730000	3	13786711	772931	69.12
Kab.Wonogiri	2012	775000	3.43	14605088	814327	73.09
Kab.Wonogiri	2013	830000	8.6	15303280	858272	71.98
Kab.Wonogiri	2014	954000	7.2	16107795	954110	71.52
Kab.Wonogiri	2015	1101000	2.13	16977199	1089999	69.12
Kab.Wonogiri	2016	1293000	2.94	17865345	1293962	70.50
Kab.Wonogiri	2017	1401000	2.32	18788398	1316734	71.22
Kab.Karanganyar	2011	801500	3.31	17205063	820800	72.71
Kab.Karanganyar	2012	846000	3.29	18219456	852340	72.21
Kab.Karanganyar	2013	896500	8.7	19256516	896500	71.04
Kab.Karanganyar	2014	1060000	7.38	20262444	1129321	69.58
Kab.Karanganyar	2015	1226000	2.4	21286287	1202151	71.18
Kab.Karanganyar	2016	1420000	1.93	22428794	1420000	69.64
Kab.Karanganyar	2017	1560000	3.15	23665952	1481344	70.24
Kab.Sragen	2011	760000	0.14	16870231	771035	72.76
Kab.Sragen	2012	810000	0.18	17902104	814028	75.97
Kab.Sragen	2013	864000	7.55	19102182	871078	73.68
Kab.Sragen	2014	960000	8.51	20169825	963245	71.44
Kab.Sragen	2015	1105000	3.05	21390871	1095000	71.91
Kab.Sragen	2016	1300000	2.49	22618322	1314166	71.28
Kab.Sragen	2017	1422585	3.18	23933252	1336499	71.12
Kab.Grobogan	2011	735000	0.1	13172711	828559	75.53
Kab.Grobogan	2012	785000	4.48	13842047	841326	75.19
Kab.Grobogan	2013	842000	7.88	14474729	896347	73.13
Kab.Grobogan	2014	935000	8.03	15064457	1000978	74.65
Kab.Grobogan	2015	1160000	3.31	15962619	1228094	71.09
Kab.Grobogan	2016	1305000	2.41	16674630	1304045	71.09
Kab.Grobogan	2017	1435000	4.05	17617254	1380795	72.15
Kab.Blora	2011	816200	2.26	10597723	829851	72.42
Kab.Blora	2012	855500	3.55	11116865	868348	73.63
Kab.Blora	2013	932000	7.94	11712505	941021	75.1
Kab.Blora	2014	1009000	7.13	12227201	1008527	68.5
Kab.Blora	2015	1180000	2.85	12882588	1156492	70.77
Kab.Blora	2016	1328500	2.14	15913432	1328498	69.56
Kab.Blora	2017	1438100	2.98	16843361	1364640	70.21
Kab.Rembang	2011	757600	0.13	8808302	805921	75.94
Kab.Rembang	2012	816000	4.28	9277163	850144	74.6
Kab.Rembang	2013	896000	6.88	9780750	914118	72.94
Kab.Rembang	2014	985000	7.59	10284274	984725	68.13
Kab.Rembang	2015	1120000	2.66	10850269	1119953	66.97
Kab.Rembang	2016	1300000	1.75	11418009	1299901	64.39

Kab.Rembang	2017	1300000	3.31	12123469	1330787	70.78
Kab.Pati	2011	769550	2.3	19893325	793351	69.73
Kab.Pati	2012	837500	0.19	21072328	850253	70.72
Kab.Pati	2013	927600	7.57	22329694	927600	70.77
Kab.Pati	2014	1013027	8.01	23365214	1013027	68.91
Kab.Pati	2015	1176500	3.23	24770325	1171391	67.83
Kab.Pati	2016	1310000	2.31	26121955	1402071	67.91
Kab.Pati	2017	1420500	3.51	27532168	1435526	66.83
Kab.Kudus	2011	840000	3.34	55175794	852736	74.1
Kab.Kudus	2012	889000	0.22	57440810	889568	74.94
Kab.Kudus	2013	990000	8.31	59944557	1004157	73.06
Kab.Kudus	2014	1150000	8.59	62600681	1106043	71.92
Kab.Kudus	2015	1380000	3.28	65029938	1299159	71.04
Kab.Kudus	2016	1608200	2.32	66669085	1426656	70.27
Kab.Kudus	2017	1740900	4.17	68649054	1516412	71.75
Kab.Jepara	2011	758000	3.59	14004325	823177	71.75
Kab.Jepara	2012	800000	4.52	14824995	825800	71.8
Kab.Jepara	2013	875000	7.95	15623739	902218	70.19
Kab.Jepara	2014	1000000	9.87	16374715	1038345	68.12
Kab.Jepara	2015	1150000	4.57	17210366	1141244	68.13
Kab.Jepara	2016	1350000	3.45	18074135	1276067	66.72
Kab.Jepara	2017	1600000	2.83	19001041	1335833	69.85
Kab.Demak	2011	847987	3.49	12275702	874214	68.27
Kab.Demak	2012	893000	4.1	12823227	910295	70.13
Kab.Demak	2013	995000	8.22	13499226	1000850	68.11
Kab.Demak	2014	1280000	8.69	14078420	1278669	67.86
Kab.Demak	2015	1535000	2.8	14913000	1463358	68.84
Kab.Demak	2016	1745000	2.27	15666348	1679693	68.30
Kab.Demak	2017	1900000	3.57	16537579	1797620	67.73
Kab.Semarang	2011	880000	3.29	22925456	920781	75.92
Kab.Semarang	2012	941600	4.56	24306718	964000	76.59
Kab.Semarang	2013	1051000	8.11	25758121	1051000	74.14
Kab.Semarang	2014	1208200	8.63	27264113	1176817	75.34
Kab.Semarang	2015	1419000	2.85	28768327	1381603	75.33
Kab.Semarang	2016	1610000	2.39	30283033	1584134	74.74
Kab.Semarang	2017	1745000	3.67	31939250	1649262	76.37
Kab.Temanggung	2011	779000	2.42	10301569	825319	75.91
Kab.Temanggung	2012	866000	0.22	10740983	865716	77.33
Kab.Temanggung	2013	940000	7.01	11299343	939400	76.7
Kab.Temanggung	2014	1050000	7.81	11867680	1049595	76.73
Kab.Temanggung	2015	1178000	2.74	12489395	1175426	75.47

Kab.Temanggung	2016	1313000	2.42	13110746	1322174	75.98
Kab.Temanggung	2017	1431500	3.12	13724465	1381965	74.37
Kab.Kendal	2011	843750	3.49	20032434	878630	70.7
Kab.Kendal	2012	893000	0.19	21075717	910295	72.81
Kab.Kendal	2013	953100	6.9	22386124	972070	71.86
Kab.Kendal	2014	1206000	8.34	23536834	906328	71.22
Kab.Kendal	2015	1383450	4.13	24762325	1383445	65.7
Kab.Kendal	2016	1639600	2.47	26131137	1639567	66.98
Kab.Kendal	2017	1774867	3.6	27586097	1630895	66.49
Kab.Batang	2011	805000	3.01	10025044	972070	72.72
Kab.Batang	2012	880000	0.18	10488456	906328	72.45
Kab.Batang	2013	970000	8.08	11104697	1031000	70.97
Kab.Batang	2014	1146000	7.66	11693897	1145000	71.67
Kab.Batang	2015	1270000	2.94	12328239	1269000	67.62
Kab.Batang	2016	1467500	2.24	12942691	1499560	67.79
Kab.Batang	2017	1603000	3.44	13627280	1521106	67.7
Kab.Pekalongan	2011	810000	0.13	10834201	840889	73.17
Kab.Pekalongan	2012	873000	0.15	11354849	888978	71.48
Kab.Pekalongan	2013	962000	8.18	12034806	967699	69.37
Kab.Pekalongan	2014	1145000	8.32	12630369	1135937	69.52
Kab.Pekalongan	2015	1271000	3.42	13234564	1258488	64.6
Kab.Pekalongan	2016	1463000	2.96	13917702	1411394	63.90
Kab.Pekalongan	2017	1583697	4.01	14652179	1496827	70.98
Kab.Pemalang	2011	725000	0.14	11847199	788064	64.17
Kab.Pemalang	2012	793000	4.04	12477235	830905	68.3
Kab.Pemalang	2013	908000	6.52	13172064	940734	66.62
Kab.Pemalang	2014	1066000	7.38	13898669	1104244	69.15
Kab.Pemalang	2015	1193400	3.52	14673696	1170000	63.32
Kab.Pemalang	2016	1325000	2.33	15463801	1349340	66.06
Kab.Pemalang	2017	1460000	3.64	16297654	1429265	65.57
Kab.Tegal	2011	725000	0.13	16071820	768158	65.17
Kab.Tegal	2012	795000	4.13	16912249	839344	64.32
Kab.Tegal	2013	850000	7.79	18050292	850000	62.56
Kab.Tegal	2014	1000000	8.48	18958841	1012000	63.65
Kab.Tegal	2015	1155000	3.64	19999475	1163000	60.91
Kab.Tegal	2016	1373000	2.67	21182917	1373769	60.57
Kab.Tegal	2017	1487000	3.58	22322100	1417147	66.41
Kab.Brebes	2011	717000	3.09	21498422	814931	63.61
Kab.Brebes	2012	775000	0.21	22482262	827833	64.2
Kab.Brebes	2013	859000	9.83	23812057	859000	73.03
Kab.Brebes	2014	1000000	6.2	25074172	1023644	65.18

Kab.Brebes	2015	1166550	3.08	26572835	1166583	62.81
Kab.Brebes	2016	1310000	2.84	27921986	1309908	65.58
Kab.Brebes	2017	1418100	4.24	29450229	1365894	67.42
Kota Magelang	2011	795000	4.15	4255662	853274	71.83
Kota Magelang	2012	837000	0	4484268	877442	69.45
Kota Magelang	2013	915900	7.79	4755092	915900	68.37
Kota Magelang	2014	1145000	7.92	4992113	1023581	68.49
Kota Magelang	2015	1211000	2.7	5247341	1241486	64.35
Kota Magelang	2016	1341000	2.25	5518685	1341689	63.72
Kota Magelang	2017	1453000	3.9	5804312	1406417	65.32
Kota Surakarta	2011	826252	0.11	22848439	835137	67.22
Kota Surakarta	2012	864450	0.14	24123781	864450	70.43
Kota Surakarta	2013	974000	8.32	25631681	973806	72.1
Kota Surakarta	2014	1170000	8.01	26984359	1169166	68.48
Kota Surakarta	2015	1222400	2.56	28453494	1199545	70.12
Kota Surakarta	2016	1418000	2.15	29966373	1418214	70.82
Kota Surakarta	2017	1534985	3.1	31562980	1488323	66.1
Kota Salatiga	2011	843469	0.14	6230219	843469	67.83
Kota Salatiga	2012	901396	4.12	6574907	901396	68.85
Kota Salatiga	2013	1209100	7.67	6989045	1229077	67.96
Kota Salatiga	2014	1423500	7.84	7378043	1403501	65.27
Kota Salatiga	2015	1287000	2.61	7759182	1279221	62.7
Kota Salatiga	2016	1450953	2.19	8163941	1475139	62.37
Kota Salatiga	2017	1596844	3.5	8589010	1635259	70.53
Kota Semarang	2011	961323	0.14	86142966	961323	69.24
Kota Semarang	2012	991500	0.41	91282029	991503	67.84
Kota Semarang	2013	980000	2.19	96985402	977064	67.1
Kota Semarang	2014	1165000	8.53	103109875	1158417	68.43
Kota Semarang	2015	1685000	2.56	109110690	1663917	66.96
Kota Semarang	2016	1909000	2.32	115485429	1909236	66.72
Kota Semarang	2017	2125000	3.64	122000440	1970726	69.87
KotaPekalongan	2011	810000	2.45	4878332	852485	68.48
KotaPekalongan	2012	895500	3.55	5151813	895481	69.73
KotaPekalongan	2013	860000	7.4	5456197	855000	66.22
KotaPekalongan	2014	1044000	7.82	5755282	1040624	69.32
KotaPekalongan	2015	1291000	3.46	6043096	1278778	67.47
KotaPekalongan	2016	1500000	2.94	6367273	1426501	67.52
KotaPekalongan	2017	1623750	3.61	6706279	1478704	69.28
Kota Tegal	2011	735000	2.58	7341540	8024100	63.4
Kota Tegal	2012	795000	0.4	7650479	826975	63.45
Kota Tegal	2013	914275	5.8	8084176	940375	70.97

Kota Tegal	2014	1066603	7.4	8491325	1077793	65.09
Kota Tegal	2015	1206000	3.95	8953880	1202157	65.17
Kota Tegal	2016	1385000	2.71	9440531	1202157	67.17
Kota Tegal	2017	1499500	4.03	9955593	1072416	66.33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN 2

HASIL UJI COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOGUMR
Method: Panel Least Squares
Date: 04/11/19 Time: 22:41
Sample: 2011 2017
Periods included: 7
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.450147	0.648877	3.775983	0.0002
INFLASI	0.001596	0.003594	0.443992	0.6574
LOGPDRB	0.046931	0.015305	3.066384	0.0024
LOGKHL	0.771791	0.039479	19.54961	0.0000
TPAK	-0.001133	0.002650	-0.427537	0.6694
R-squared	0.657850	Mean dependent var	13.89134	
Adjusted R-squared	0.652147	S.D. dependent var	0.256259	
S.E. of regression	0.151139	Akaike info criterion	-0.921032	
Sum squared resid	5.482347	Schwarz criterion	-0.849577	
Log likelihood	117.8264	Hannan-Quinn criter.	-0.892257	
F-statistic	115.3615	Durbin-Watson stat	0.844105	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

LAMPIRAN 3

HASIL UJI *FIXED EFFECT MODEL*

Dependent Variable: LOGUMR
Method: Panel Least Squares
Date: 04/11/19 Time: 22:42
Sample: 2011 2017
Periods included: 7
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.52442	0.886682	-24.27525	0.0000
INFLASI	-0.004700	0.001571	-2.992406	0.0031
LOGPDRB	2.021399	0.063762	31.70203	0.0000
LOGKHL	0.122284	0.027329	4.474455	0.0000
TPAK	0.000977	0.002222	0.439638	0.6607

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.946557	Mean dependent var	13.89134
Adjusted R-squared	0.936698	S.D. dependent var	0.256259
S.E. of regression	0.064474	Akaike info criterion	-2.500109
Sum squared resid	0.856333	Schwarz criterion	-1.942766
Log likelihood	345.2634	Hannan-Quinn criter.	-2.275668
F-statistic	96.01451	Durbin-Watson stat	0.973833
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

LAMPIRAN 4

HASIL UJI RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOGUMR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/11/19 Time: 22:43
 Sample: 2011 2017
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 245
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.245749	0.345336	6.503093	0.0000
INFLASI	0.001506	0.001550	0.971616	0.3322
LOGPDRB	0.098322	0.012238	8.034468	0.0000
LOGKHL	0.744589	0.018162	40.99753	0.0000
TPAK	-0.005046	0.001650	-3.058610	0.0025
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.039424	0.2721
Idiosyncratic random			0.064474	0.7279
Weighted Statistics				
R-squared	0.668363	Mean dependent var	7.303959	
Adjusted R-squared	0.662836	S.D. dependent var	0.248348	
S.E. of regression	0.144205	Sum squared resid	4.990824	
F-statistic	120.9208	Durbin-Watson stat	0.879735	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.637238	Mean dependent var	13.89134	
Sum squared resid	5.812610	Durbin-Watson stat	0.755358	

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

LAMPIRAN 5

HASIL UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32.730472	(34,206)	0.0000
Cross-section Chi-square	454.874024	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOGUMR

Method: Panel Least Squares

Date: 04/11/19 Time: 22:44

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.450147	0.648877	3.775983	0.0002
INFLASI	0.001596	0.003594	0.443992	0.6574
LOGPDRB	0.046931	0.015305	3.066384	0.0024
LOGKHL	0.771791	0.039479	19.54961	0.0000
TPAK	-0.001133	0.002650	-0.427537	0.6694

R-squared	0.657850	Mean dependent var	13.89134
Adjusted R-squared	0.652147	S.D. dependent var	0.256259
S.E. of regression	0.151139	Akaike info criterion	-0.921032
Sum squared resid	5.482347	Schwarz criterion	-0.849577
Log likelihood	117.8264	Hannan-Quinn criter.	-0.892257
F-statistic	115.3615	Durbin-Watson stat	0.844105
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8

LAMPIRAN 6

HASIL UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	964.595024	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
INFLASI	-0.004700	0.001506	0.000000	0.0000
LOGPDRB	2.021399	0.098322	0.003916	0.0000
LOGKHL	0.122284	0.744589	0.000417	0.0000
TPAK	0.000977	-0.005046	0.000002	0.0001

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGUMR

Method: Panel Least Squares

Date: 04/11/19 Time: 22:46

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.52442	0.886682	-24.27525	0.0000
INFLASI	-0.004700	0.001571	-2.992406	0.0031
LOGPDRB	2.021399	0.063762	31.70203	0.0000
LOGKHL	0.122284	0.027329	4.474455	0.0000
TPAK	0.000977	0.002222	0.439638	0.6607

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.946557	Mean dependent var	13.89134
Adjusted R-squared	0.936698	S.D. dependent var	0.256259
S.E. of regression	0.064474	Akaike info criterion	-2.500109
Sum squared resid	0.856333	Schwarz criterion	-1.942766
Log likelihood	345.2634	Hannan-Quinn criter.	-2.275668
F-statistic	96.01451	Durbin-Watson stat	0.973833
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 8